

2022

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
KECAMATAN TENGGARONG  
TAHUN 2022**



**KECAMATAN TENGGARONG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2023**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Tenggarong Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Tenggarong Semoga LKjIP Kecamatan Tenggarong ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Tenggarong, Februari 2023

Camat Tenggarong



SUKONO, S.Pd, M.PD  
NIP. 19720213 200701 1 022



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Nilai	75



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	1	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Nilai	85
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	1	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	Persen	75
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak lanjuti	Jumlah	1
		2	Pengamanan Bidang Tanall	Jumlah	33
		3	Persentase ketepatan walrhr dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Malsimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertangsal 31 Maret 2022	Persen	100
		5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Marct 2022	Persen	100
		6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kuka	Persen	100
6	Membuat inovasi dan/ atau diutamakan dalam bidang	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.				
7	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang		Capaian Output Kegiatan	Persen	100



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	vi	
DAFTAR TABEL	ix	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	7
	E. Sumber Daya Aparatur	19
	F. Sumber Daya Keuangan	20
	G. Isu-Isu Strategis	20
	H. Sistematika Laporan Kinerja	21
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>23</b>
	A. Perencanaan Kinerja	23
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	23
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	28
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
	B. Perjanjian Kinerja	38
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2022	36
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>52</b>
	A. Pengukuran Kinerja	52
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	58
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	58
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	59



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

3	Analisis Kinerja Sasaran 3	61
4	Analisis Kinerja Sasaran 4	62
5	Analisis Kinerja Sasaran 5	70
6	Analisis Kinerja Sasaran 6	70
7	Analisis Kinerja Sasaran 7	70
8	Analisis Kinerja Sasaran 8	70
C.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	74
D.	Realisasi Anggaran	75
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>109</b>
	<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	



**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Tenggarong dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tenggarong Tahun 2022;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2022; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tenggarong Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tenggarong
2. Mendorong Kecamatan Tenggarong di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tenggarong untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Tenggarong di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

#### **B. Gambaran Umum**

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Tenggarong masuk dalam zona tengah yang terletak diantara 116°47' Bujur Timur/Longitude East 117°04' Bujur Timur/Longitude East 0°21' Lintang Selatan/Latitude North 0°21' Lintang Selatan/Latitude South. Kecamatan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Tenggarong secara administrative berbatasan dengan, Sebelah Utara : Kecamatan Sebulu, Sebelah Timur : Tenggarong Seberang, Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Kulu, Sebelah Barat : Kecamatan Sebulu.

Luas Kecamatan Tenggarong 398,10 Km<sup>2</sup>., Dengan luas daratan 420,10 Secara administratif Kecamatan Tenggarong terdiri atas 2 desa dan 12 kelurahan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Tenggarong



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan tenggarong sebagai berikut :

Tabel 1 Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenggarong

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah Laut (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Jahab	161,57	0	161,57	
2	Bukit Biru	13,45	0	13,45	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

3	Timbau	10,00	0	10,00	
4	Melayu	9,00	0	9,00	
5	Loa Ipuh	67,38	0	67,38	
6	Maluhu	8,00	0	8,00	
7	Panji	13,70	0	13,70	
8	Sukarame	4,00	0	4,00	
9	Baru	7,00	0	7,00	
10	Mangkurawang	20,00	0	20,00	
11	Loa Tebu	52,00	0	52,00	
12	Loa Ipuh Darat	20,00	0	20,00	
13	Rapak Lambur	12,00	0	12,00	
14	Bendang Raya	22,00	0	22,00	
TOTAL		420,10		420,10	

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan kecamatan tenggarong

Jumlah penduduk mencapai 96.209 jiwa (sensus 2010), dan berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semester II tahun 2021 sebanyak 110.666 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong per kelurahan dan desa :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong 2022

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Jahab	2.409	2.270	4.679
2	Bukit Biru	2.531	2.415	4.946
3	Timbau	8.995	8.632	17.627
4	Melayu	7.890	7.665	15.555
5	Loa Ipuh	13.138	12.485	25.623
6	Maluhu	3.097	2.970	6.067
7	Panji	3.016	2.746	5.762
8	Sukarame	1.931	1.983	3.914
9	Baru	3.040	2.918	5.985
10	Mangkurawang	4.507	4.234	8.741
11	Loa Tebu	2.589	2.297	4.886
12	Loa Ipuh Darat	2.004	1.873	3.877



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

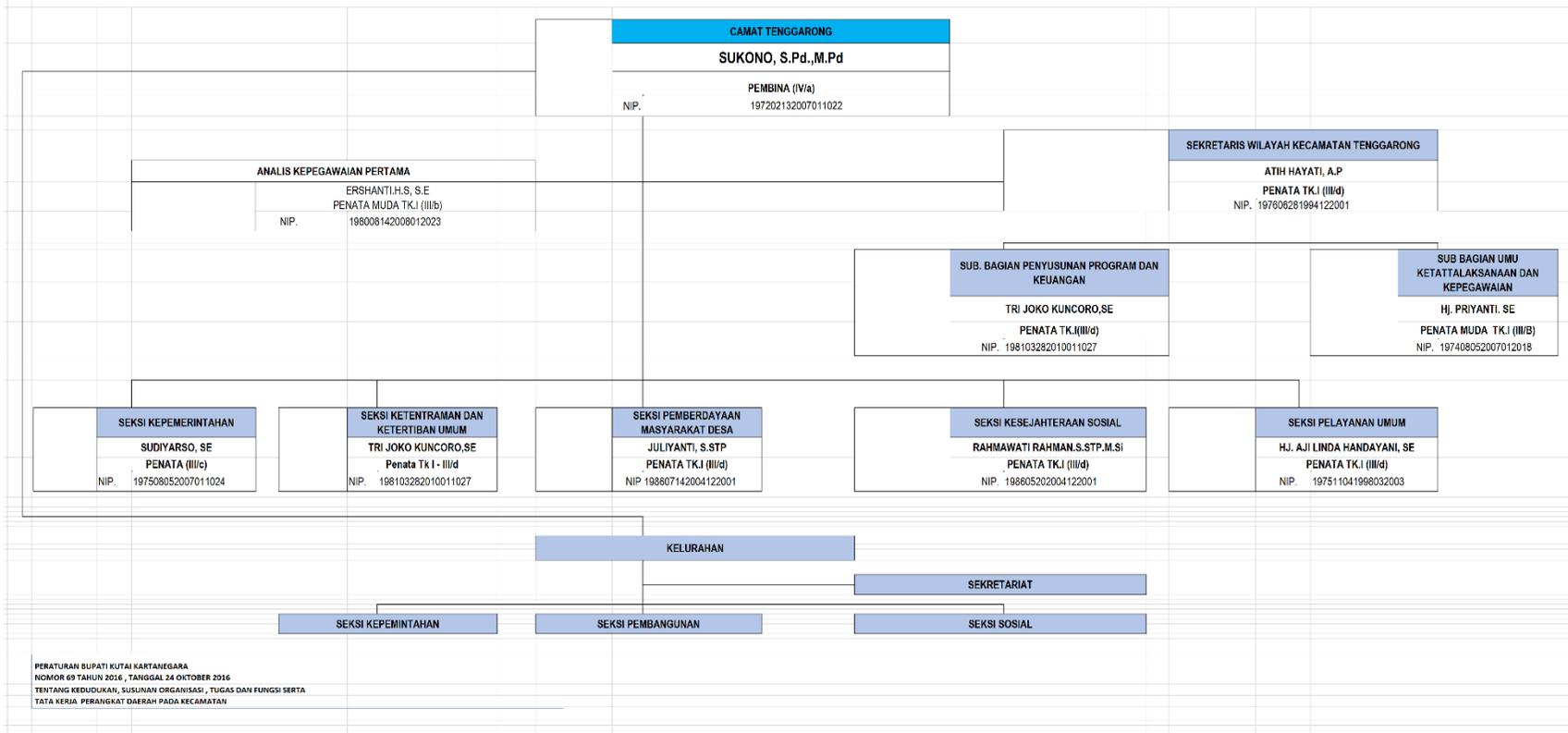
13	Rapak Lambur	1.025	989	2.014
14	Bendang Raya	549	468	1.017
JUMLAH		56.721	53.945	110.666

*Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

### C. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TENGGARONG TIPE A  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 69 TAHUN 2016, TANGGAL 24 OKTOBER 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN



Pembentukan Kecamatan Tenggarong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
  - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
  - a. Sekretaris;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Pembangunan; dan
  - d. Seksi Sosial.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan



- dan mengawasi kegiatan kecamatan.
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
  3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana.
  7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
  8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya.
  9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat.
  10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pela-



yanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan.

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :**

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD.



7. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa.
10. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat.
11. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALASANAAN DAN KEPEGAWAIAN ADALAH:**

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai



dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD.

5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi.
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja
7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



**URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

:

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pe- doman pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris.
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD.
5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan me- nyiapka Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan ke- angan.
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**SEKSI PEMERINTAHAN MEMPUNYAI TUGAS SEBAGAI BERIKUT :**

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan.
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan.
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga.
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan.
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan.
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang



diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Seksi ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat (Tramtib) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan.
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA.
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi.
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba,



psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi pemerdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
3. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan



daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.

7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang.
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air.
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, per- tamanan dan keindahan lingkungan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayan Masyarakat Desa.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksana- naan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pela- yanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang



ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Ber- encana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembanganl kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keo- lahragaan.
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidi- kan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja danStandar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial.
12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial.
13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial.
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



#### SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan.
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu pen- erangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, peman- tauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman.  
erencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang peker- jaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bu- pati.
5. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
6. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
7. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, per- tamanan dan keindahan lingkungan.
8. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan ma- sukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.  
merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan.
9. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan



Daerah urusan Pelayanan Umum.

10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum.
11. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

**E. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Tenggarong per 31 Desember 2021 sebanyak 67 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	1	0	1	1,49%
2	SLTP	2	0	2	2,99%
3	SLTA	21	15	36	53,73%
5	D-I	0	0	0	0,00%
6	D-II	0	0	0	0,00%
7	D-III	0	2	2	2,99%
8	D-IV	0	1	1	1,49%
9	S1	9	14	23	34,33%
10	S2	1	1	2	2,99%
11	S3	0	0	0	0,00%
Jumlah		34	33	67	100,00%

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 4.PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	2	0	2	2,99%
2	II	21	15	37	53,73%
3	III	10	18	28	41,79%
4	IV	1	0	1	2,99%



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Jumlah	34	33	67	100%
--	--------	----	----	----	------

### c. Berdasarkan Eselon

Tabel 5.PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	11,11%
4	III.b	0	1	1	11,11%
5	IV.a	2	3	5	55,56%
6	IV.b	0	2	2	22,22%
Jumlah		3	6	9	100,00%

### d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 6.PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	3	6	9	13,43%
2	Fungsional Guru	0	0	0	0,00%
3	Fungsional Non Guru	0	1	1	1,49%
4	Pelaksana	31	26	57	85,57%
Jumlah		34	33	68	100,00%

### F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong pada Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tenggarong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.527.724.440,00 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 29 (Dua puluh Sembilan) sub kegiatan.

### G. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi



tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan

Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tenggarong adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan kewilayahan
4. Pengarustamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik.

Isu-isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara berhubungan dengan isu-isu Kecamatan terutama pada point 1 Peningkatan pelayanan \kepada masyarakat dan point 2 Tentang pemberdayaan masyarakat sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

#### **H. Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

---

IkhtisarEksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Kinerja**

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenggarong merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Tenggarong yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Tenggarong telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, dan setelah melakukan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2021 – 2026 sehingga Kecamatan Tenggarong menyusun Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Dalam Dokumen Visi dan Misinya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menjelaskan bahwa terdapat 5 frasa kalimat, diantaranya :

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani



- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Tenggarong mempunyai **Misi pertama** dan **Misi kelima** yang terlihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publi
2.	Meningkatkan	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembangunan	Meningkatnya Kualitas	Indek pendidikan,In



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	pembangunan manusia yang berdaya saing		Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	dek pembangunan kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indek Kesehatan
				Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan
				Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks gini, Indeks desa membangun
				Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuk
<b>3</b>	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan batu bara		
				Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

				daera	Perikanan
				Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreati
				Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Pemerataan Infracstruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan geografis, Presentase penurunan kawasan kumuh		
				Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih persentase rumah layak huni
				Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan		
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan
				Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Tenggarong berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- b. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indicator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
- c. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indicator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

## 2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Tenggarong dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

### b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tenggarong, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	73	70	68	65	60	50



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	n pelayanan publik kecamatan	kecamatan yang ditindaklanjuti								
	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Nilai	N/A	75	76	78	79	80	

### c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKA
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan Penyelenggaraan	Meningkatkan Penyelenggaraan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya kinerja dan tata kelola Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

### d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti			
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>
				<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Tenggarong Tahun 2022**

			Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



				<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>
				<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
				<b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>
				<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b>

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Nilai	75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	1	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Nilai	85
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	1	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	Persen	75
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak lanjuti	Jumlah	1
		2	Pengamanan Bidang Tanall	Jumlah	33
		3	Persentase ketepatan walrhr dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Malsimal 14	Persen	100



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

			hari Kerja setelah keepakatan RAPBD Tahun 2022)		
		4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertangsal 31 Maret 2022	Persen	100
		5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Marct 2022	Persen	100
		6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kuka	Persen	100
6	Membuat inovasi dan/ atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
7	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang		Capaian Output Kegiatan	Persen	100

### C. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun Anggaran 2022, Kecamatan Tenggarong melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 94.130.872.862,00



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2022 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar Rp. 112.527.724.440,00

Tabel 12. Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 94.130.872.862,00	Rp. 112.527.724.440,00	Rp.18.396.851.578,00

### 1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Tabel 13. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>Belanja Operasi</b>	Rp. 90.628.383.862	Rp. 106.880.964.440	Rp. 16.252.580.578
<b>Belanja Modal</b>	Rp. 3.502.489.000	Rp. 5.646.760.000	Rp.2.144.271.000
<b>Total</b>	Rp.94.130.872.862,00	Rp.112.527.724.440,00	Rp. 18.396.851.578,00

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2022, Kecamatan Tenggarong mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. per Sasaran Tahun 2022



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan			
Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	94.130.872.862,00	112.527.724.440,00	18.396.851.578,00
<b>Total</b>	94.130.872.862,00	112.527.724.440,00	18.396.851.578,00

3. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 merencanakan 3 (tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 29 (dua puluh Sembilan) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	SebelumPerubahan	SetelahPerubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.349.284	<b>88.584.284</b>	- 6.765.000
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.597.521.798	<b>34.603.356.276</b>	5.834.478
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		<b>315.217.100</b>	315.217.100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	815.172.000	-	- 815.172.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	896.980.000	<b>413.120.000</b>	- 483.860.000
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.604.584	<b>57.664.584</b>	6.060.000
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah			



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.994	<b>36.999.994</b>	22.000.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	775.843.000	<b>928.130.000</b>	152.287.000
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.871.457	<b>346.181.457</b>	199.310.000
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.193.954	<b>81.193.954</b>	27.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	<b>250.000.000</b>	100.000.000
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.083.000	<b>23.719.000</b>	- 12.364.000
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.317.280	<b>500.000.000</b>	- 220.317.280
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.068.998	<b>49.828.247</b>	29.759.249
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	<b>80.000.000</b>	30.000.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.394.704	<b>268.394.704</b>	10.000.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<b>500.000.000</b>	500.000.000
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<b>41.819.000</b>	41.819.000
27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
28	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	<b>233.270.000</b>	233.270.000
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
30	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		<b>675.000.000</b>	675.000.000
31	Pengadaan Mebel	53.000.000	<b>302.220.000</b>	249.220.000
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.490.000	<b>578.075.000</b>	545.585.000
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	127.000.000	<b>99.070.000</b>	- 27.930.000



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Lainnya			
34	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
35	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			
36	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	24.785.000.000	<b>40.025.400.000</b>	15.240.400.000
37	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
38	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
39	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	17.719.892.016	<b>17.645.513.000</b>	- 74.379.016
40	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	2.424.156.000	<b>2.372.446.000</b>	- 51.710.000
41	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
42	<b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>	9.198.763.840	<b>11.410.751.840</b>	2.211.988.000
43	<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b>	1.017.170.953	<b>451.770.000</b>	- 565.400.953



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya disbanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta diuraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, sertaprestasi yang terkait sasaran/ indicator kinerja.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indicator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang



semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil



Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tenggarong atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2022 yang terdiri dari 2 sasaran sesuai Renstra dan 6 sasaran tambahan, adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Nilai	75			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Persen	85	80,17	95	
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	Persen	75	75	100	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

4.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	1	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1			Dalam proses
		2	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	33			Masih dalam penelusuran dan belum ditemukan
		3	Persentase ketepatan walhr dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	Sudah Terinfutnya Semua Kegiatan Kedalam Aflikasi SIRUP
		4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertangsal 31 Maret 2022	Persen	100	80,65	81	Pertanggal 27 Februari 2023



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Tenggarong Tahun 2022**

		5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Marct 2022	Persen	100	100	100	Target tercapai
		6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	70	100	Dalam Proses pengarsipan
<b>5.</b>	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	
<b>6.</b>	Membuat inovasi dan atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.		Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	
<b>7.</b>	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2			



	(DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya							
8.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Target Terpenuhi	

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Tenggarong memiliki 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2022 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2022, Kecamatan Tenggarong memiliki 8 (Delapan) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja  $\geq 95$  % kategori “sangat berhasil” sebanyak 9 Indikator, atau 70 %;
- Capaian kinerja 80 s/d  $<95\%$  kategori “berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 20%;
- Capaian kinerja 50 s/d  $<80\%$  kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 20 % dan
- Capaian kinerja 0 s/d  $< 50\%$  kategori “kurang berhasil” sebanyak 4



Indikator, atau 31 %.

## B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

### 1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu sebagai berikut :

#### 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah

Tabel 18. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian



1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Nilai	75		
----	--	---	-------	----	--	--

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong” tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indicator ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2022 Kecamatan Tenggarong tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Walaupun Tahun 2022 di Kecamatan Tenggarong tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, tetapi kewajiban perangkat daerah terhadap pemenuhan dokumen-dokumen terkait Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, seperti Menyusun Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Pemenuhan atas kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Aplikasi <https://sakup.kukarkab.go.id/>.

## 2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong.”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan kecamatan Tenggarong diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu sebagai berikut :

1. Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong sesuai tabel 19 berikut :



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Persen	85	80,17	95 %

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong “ dengan indicator Nilai kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan tenggarong dengan kategori berhasil. Dalam hal ini indicator ini sudah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan melalui kuisisioner.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 melihat dari hasil survey responden sangat berhasil dengan jumlah 100 responden, dalam hal ini walaupun capaian terpenuhi namun belum memuaskan karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi.

Tabel 20 **Data Kunjungan Unit Pelayanan**

### DATA KUNJUNGAN UNIT PELAYANAN

Pelayanan	DATA PENGUNJUNG		Target Sampling (Krejcie & Morgan)
	Tahun 2021	Rata-rata bulanan	
Surat Tanah	1431	238.50	147
Ahli Waris	502	83.67	69
Surat Pindah Keluar	325	54.17	48
Surat Kedatangan	310	51.67	46
Pengantar Nikah	19	3.17	3
Kartu Kuning	57	9.50	9
Surat Kuasa Ahli Waris	471	78.50	65
SIUP	1	0.17	0



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Kartu Keluarga	635	105.83	83
Jumlah	3751	625.17	471

Catatan : Data diambil per Januari 2022 sampai dengan Desember 2022

Adapun faktor pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong

1. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong
2. Adanya SDM yang bisa di andalkan
3. Suasana Kantor yang nyaman dan kondusif.
4. Keamanan, kebersihan, ketertiban kantor yang terjaga.

### 3. Analisis kinerja sasaran ke 3 : Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong”.dengan indicator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong,

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel 21 berikut ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	Persen	75	75	100



Sementara untuk Sasaran Tambahan ada ada 6 {enam} Sasaran dan 11 {Sebelas} Indikator sasaran dengan penjelasan capaian sebagai berikut :

4. Analisis kinerja sasaran :Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong.dengan indicator sebagai berikut :

**1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “MeningkatnyaTransparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indicator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti,untuk tahun 2022 masih ditemukan 1 dan dalam tahap penyelesaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22 Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator	FormulasiPerhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang telah ditindak lanjuti perangkat daerah.

Tabel 23 Realisasi Indikator Sasaran Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan	Temuan	Jumlah	1	-	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut				
---	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian kinerja indicator ini belum bisa dikategorikan berhasil dikarenakan masih ada 1 (Satu) temuan dan dalam tahap proses penyelesaian sementara untuk kendala yang dihadapi tidak ada kendala karna penyelesaian ini masih berjalan sampai dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2023.

### 2. Pengamanan Bidang Tanah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah mencapai **0,00 %** dan termasuk predikat **“Kurang Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator Pengamanan Bidang Tanah terlihat pada tabel berikutini:

Tabel 24 Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kecamatan	Pengamanan Bidang Tanah	Perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan tanah oleh Bidang Aset BPKAD.

Tabel 25 Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah

N	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022
---	---------	-----------	--------	------------



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

o.	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong Pengamanan Bidang Tanah Jumlah	33	0	0,00 %

Pencapaian kinerja ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong menyajikan tanah bangunan seperti data pada tabel berikut ini :

Tabel 26 Data Tanah Kecamatan Tenggarong

No	Bidang Tanah	Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Status	Pemanfaatan/ Penggunaan
1	Tanah dan Bangunan	Tenggarong	1121 M <sup>2</sup>	Hak Pakai	Kantor Camat Tenggarong

Dalam hal ini untuk pengamanan bidang tanah sudah dilakukan penelusuran dan belum ditemukan karna terkendala data dalam pencarian.

### 3. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022).

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

(Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) mencapai **100 %** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 27 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Kesesuaian Anggaran Belanja SIPD Dan Isian Data RUP, per Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 12:02 Wita.

Tabel 28 Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Persentase ketepatan Input Rencana	Persentase	100	100	100 %



Tenggarong	Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatan ganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)				
------------	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong” tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indicator ini dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2022 Kecamatan Tenggarong telah sesuai waktu untuk menginfut kedalam aplikasi sirup,Dimana dalam hal ini pengguna langsung mengisi Rup kedalam aplikasi Sirup pada webside.

#### **4. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022**



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 27 Februari 2023 mencapai **80,65 %** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel --berikut :

Tabel 29 Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKPN dari Aplikasi e-LHKPN.

Tabel 30 Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100 %

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Untuk pencapaian indicator ini kategori berhasil karna data yang diambil pertanggal 27 Februari 2023 dengan capaian 80,65 % dan sebanyak 19,35 % yang belum lapor.

### 5. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 31 Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKASN, data kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 32 Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100 %

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Untuk indikator ini sudah sangat berhasil karna tingkat kesadaran PNS sebagai eselon untuk melaporkan harta kekayaan mereka.



## 6. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong” dengan Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah mencapai **100%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 33 Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 34 Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 70-80	70	baik

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :



Untuk indikator ini sudah termasuk baik karena pengelola arsip sudah mengelola arsip dengan pengumpulan arsip aktif dan tidak aktif sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kekurangan yang disebabkan susah nya mencari arsip yang tidak aktif.

#### 5. Analisis Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah” indikator dari sasaran ini adalah Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”.

#### 6. Membuat inovasi dan atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Membuat inovasi dan atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.” indikator dari sasaran ini adalah Jumlah Inovasi mencapai **100%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Dalam inovasi ini kecamatan tenggarong membuat inovasi pada lingkungan masyarakat.

#### 7. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan social ( DTKS )serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan diwilayahnya .” indikator dari sasaran ini adalah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS belum ada capaian dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**.”

#### 8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang.” indikator dari sasaran ini adalah Capaian



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

output kegiatan dalam hal ini termasuk predikat Berhasil karena kecamatan tenggarong pada tahun 2022 tidak ada utang.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam renstra perangkat daerah, juga memuat sasaran dan indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Indikator tambahan ada di Tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2022 bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 35 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA		KET
				2021	2022	
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	74,51	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	1	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	98,20	95	Sesuai IKM
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	1	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	100	100	
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat	1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat	-	-	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Daerah.		Yang di Tindak lanjut			
		2	Pengamanan Bidang Tanah	-	-	
		3	Persentase ketepatan walhr dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	100	100	Sudah terinfut sesuai dengan jadwal
		4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	100	81	Data pertanggal 27 Februari 2023
		5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Marct 2022	100		
		6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	70	-	
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	-		
6	Membuat inovasi da-n/ atau diutamakan dalam bidang	1	Jumlah Inovasi	-		



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.				
7	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	-	
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang		Capaian Output Kegiatan	100	Untuk tahun 2022 tidak ada utang

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2022 menunjukkan angka yang sama untuk capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun terdapat 2 (satu) sasaran yang menunjukkan angka penurunan yaitu pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tenggarong dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong, Kecamatan dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong dengan indicator Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong ,indicator kinerja ini merupakan indicator semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja kurang baik. Persentase Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2022 mengalami penurunan 19 % jika dibandingkan pada Tahun 2021 dan kualitas pelayanan pada tahun 2022 menurun menjadi 3,2%, sehingga disimpulkan dengan penurunan persentase Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan nilai kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan, maka capaian kinerja rendah.

Penurunan kinerja kedua sasaran ini disebabkan belum semua pegawai yang melaporkan kewajibannya dan data yang diambil pertanggal 27 februari 2022 sedangkan untuk pelayanan dikarenakan responden yang ada tidak terlalu banyak pada setiap bulannya,



Sementara sasaran yang lainnya tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

Sasaran yang lainnya belum bisa mengambil perbandingan dikarenakan pada tahun 2021 sasaran dan indicator tersebut belum ada.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

#### a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 36 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas	74,51	61.898.693.023,0	53.969.717.476,00	87,19	Tidak Efisien



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	dan jangkauan pelayanan publik kecamatan		0			
2.	Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah					Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 2 sasaran menunjukkan 1(satu) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 2 (dua) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100% dan 2 (dua) Sasaran tidak bisa diukur karna realisasi tidak ada. Dari 2 (dua) sasaran yang tidak efisien, sudah mencapai target dan penyerapan anggaran lebih lebih besar dari capaian kinerja.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ada pada Kecamatan Tenggarong dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,30 %, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 37 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti					
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Rp 45.515.798.082	Rp 42.170.039.877	92,65	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	Rp 50.000.000	Rp 33.695.000	67,39	Rp 16.305.000
		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Rp 42.316.000	Rp 41.716.000	98,58	Rp 600.000
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Rp 25.000.000	Rp 7.300.000	29,2	Rp 17.700.000
		<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 88.584.284	Rp 88.320.000	99,7	Rp 264.284

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
		<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Rp 34.603.356.276	Rp 31.685.605.488	91,57	Rp 2.917.750.788
		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	Rp 315.217.100	Rp 204.455.500	64,86	Rp 110.761.600
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>	Rp 413.120.000	Rp 413.120.000	100	Rp -
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
		<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Rp 57.664.584	Rp 57.550.000	99,8	Rp 114.584
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
		<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Rp 273.520.000	Rp 255.133.457	93,28	Rp 18.386.543
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	1.222.215.994	Rp	1.208.199.300	98,85	Rp	14.016.694
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	427.159.091	Rp	422.730.500	98,96	Rp	4.428.591
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	129.651.754	Rp	118.396.700	91,32	Rp	11.255.054
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	341.242.000	Rp	319.798.619	93,72	Rp	21.443.381
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	150.000.000	Rp	141.371.360	94,25	Rp	8.628.640
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	27.685.000	Rp	26.791.000	96,77	Rp	894.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		Pengadaan Mebel	Rp	302.220.000	Rp	295.996.000	97,94	Rp	6.224.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	590.245.000	Rp	555.793.000	94,16	Rp	34.452.000

		<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Rp 1.023.000.000	Rp 1.017.416.334	99,45	Rp 5.583.666
		<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Rp 99.070.000	Rp 97.667.000	98,58	Rp 1.403.000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Rp 2.510.000	Rp 2.509.000	99,96	Rp 1.000
		<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Rp 500.000.000	Rp 493.322.147	98,66	Rp 6.677.853
		<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Rp 3.615.990.295	Rp 3.520.163.725	99,96	Rp 95.826.570
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Rp 103.643.000	Rp 72.455.550	99,96	Rp 31.187.450
		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,</b>	Rp 275.394.704	Rp 262.299.870	99,96	Rp 13.094.834

		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 730.904.000	Rp 722.638.660	99,96	Rp 8.265.340
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 79.819.000	Rp 79.680.667	99,96	Rp 138.333
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26.270.000	Rp 25.915.000	99,96	Rp 355.000
		<b>PROGRAM PENYELENGGAR AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 40.175.400.000	Rp 39.505.721.107	98,33	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 40.175.400.000	Rp 39.505.721.107	99,96	Rp 669.678.893
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rp 36.880.408.440	Rp 35.074.404.025	95,10	

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 188.426.400	Rp 170.673.500	99,96	Rp 17.752.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 17.786.993.000	Rp 16.662.030.528	99,96	Rp 1.124.962.472
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 6.628.790.200	Rp 6.596.218.697	99,96	Rp 32.571.503
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 11.410.751.840	Rp 10.816.113.700	94,79	Rp 594.638.140
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 556.770.000	Rp 525.410.600	99,96	Rp 31.359.400
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 158.677.000	Rp 158.151.000	99,96	Rp 526.000

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Rp 150.000.000	Rp 145.806.000	97,2	Rp 4.194.000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Rp 164.453.584	Rp 164.221.526	99,86	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 164.453.584	Rp 164.221.526	99,86	Rp 232.058
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Rp 157.408.282	Rp 157.122.900	99,82	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
		Pembangunan Jalan	Rp 157.408.282	Rp 157.122.900	99,82	Rp 285.382
		<b>Jumlah</b>	Rp 122.893.468.388,00	Rp 112.037.227.976	91,16	



Pemerintah

**Laporan Kinerja Instansi**

**Kecamatan Tenggarong Tahun 2021**





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong tahun 2022 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Tenggarong pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dari Renstra Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026. Kecamatan Tenggarong telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 38. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tenggarong	Nilai	75			Belum ada penilaian
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Nilai kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Tenggarong	Persen	85	80,17	95	Sanagat Berhasil
3	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Tenggarong	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Tenggarong	Persen	75	75	100	Sangat Berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

4.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong	1	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1			Belum berhasil karena Dalam proses
		2	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	33			Belum berhasil Masih dalam penelusuran dan belum ditemukan
		3	Persentase ketepatan walhr dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	Sangat berhasil
		4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertangsal 31 Maret 2022	Persen	100	80,65	81	berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

		5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Marct 2022	Persen	100	100	100	Target tercapai
		6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	70	100	Dalam Proses pengarsipan
5.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	
6.	Membuat inovasi 11 lantau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.		Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	
7.	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2			



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Tenggarong Tahun 2022**

	(DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya							
<b>8.</b>	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil	

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja  $\geq 95\%$  kategori “sangat berhasil” sebanyak 5 Indikator, atau 99,31%;
- b) Capaian kinerja 80 s/d  $<95\%$  kategori “berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 9,09%;
- c) Capaian kinerja 50 s/d  $<80\%$  kategori “cukup berhasil” sebanyak 3 Indikator, atau 27,27%; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d  $<50\%$  kategori “kurang berhasil” sebanyak 4 Indikator,

Tabel 39. Anggaran Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
<b>Belanja Operasi</b>	Rp 69.507.733.496	Rp 60.256.032.365	86,69
<b>Belanja Modal</b>	Rp 55.385.734.892	Rp 51.781.195.611	93,50
	Rp 122.893.468.388,00	Rp 112.037.227.976	91,16



Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Kecamatan Tenggarong sebesar 92,84 % atau terjadi peningkatan kinerja sebesar **99,31%**

#### **4.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap factor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Mempertahankan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Pengembangan sistem pelaporan. harus ditingkatkan lagi
- 4) Kualitas Pelayanan masyarakat harus ditingkatkan lagi
- 5) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan
- 6) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan jembatan Kecamatan
- 7) Harus lebih banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2023

CAMAT TENGGARONG



**SUKONO, S.Pd, M.PD**

NIP. 19720213 200701 1 022



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Tenggarong .....	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	4
Tabel 3	PNS berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel 4	PNS berdasarkan Golongan .....	19
Tabel 5	PNS berdasarkan Eselon.....	20
Tabel 6	PNS berdasarkan Jabatan.....	20
Tabel 7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026 .....	27
Tabel 9	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong .....	28
Tabel 10	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	30
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	36
Tabel 12	Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	38
Tabel 13	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	38
Tabel 14	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022 .....	39
Tabel 15	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39
Tabel 16	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 .....	54
Tabel 17	Pengukuran Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	58
Tabel 18	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	58
Tabel 19	Nilai kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan tenggarong .....	59
Tabel 20	Data kunjungan unit pelayanan.....	60
Tabel 21	Rumusan dari indicator predikat akuntabilitas kinerja.....	61
Tabel 22	Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK.....	62
Tabel 23	Realisasi indicator kinerja temuan administrasi BPK/inspektur.....	62



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

Tabel 24	Pengukuran kinerja dengan indicator pengamanan bidang tanah.....	63
Tabel 25	Realisasi indicator sasaran pengamanan bidang tanah.....	63
Tabel 26	Data Tanah kecamatan tenggarong.....	64
Tabel 27	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022).....	65
Tabel 28	Realisasi indikator Sasaran ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022).....	65
Tabel 29	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022.....	67
Tabel 30	Realisasi indikator sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022.....	67
Tabel 31	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022.....	68
Tabel 32	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022.....	68
Tabel 33	Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	69
Tabel 34	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	69
Tabel 35	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2022 .....	71
Tabel 36	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	74
Tabel 37	Realisasi AnggaranTahun 2022.....	97
Tabel 38	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	109
Tabel 39	Anggaran Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Tahun 2022.....	112